

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama beberapa dekade belakangan ini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Perbaikan kurikulum terus dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi siswa dengan tuntutan kemajuan zaman. Pembinaan guru juga terus dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraannya. Berbagai intervensi terus dilakukan untuk meningkatkan layanan sekolah kepada siswa dan masyarakat. Pembangunan sarana prasarana juga terus dilakukan. Pembangunan ruang kelas baru, renovasi sekolah, revitalisasi sekolah, pengadaan sarana laboratorium, pengadaan sarana TIK dan sarana lain untuk meningkatkan layanan pembelajaran telah dan akan banyak dilakukan. Tak kalah pentingnya, berbagai peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan berbagai aturan lain tentang pengelolaan sekolah dan peningkatan proses pembelajaran juga telah banyak dihasilkan.

Namun semua intervensi yang pernah dilakukan tersebut lebih banyak berpengaruh terhadap peningkatan akses terhadap layanan pendidikan masih perlu intervensi dalam hal untuk pendidikan. Menyangkut mutu memang ada peningkatan, namun belum terlalu menggembirakan. Berdasarkan survei di beberapa sekolah dan diskusi sekolah umumnya memang melaksanakan penjaminan mutu belum utuh. Dalam beberapa diskusi kepala sekolah dan guru juga tidak tahu standar mutu yang harus mereka capai sebagai tujuan. Peningkatan mutu dianggap bukan tugas sekolah namun menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah tidak sepenuhnya merencanakan peningkatan mutu sekolah untuk memenuhi 8 SNP. Sebagai akibatnya guru akan mengajar sesuai kemampuannya dengan fasilitas seadanya, bahkan alat-alat bantu pembelajaran yang mereka miliki terkadang tidak mereka gunakan. Sekolah favorit umumnya telah mampu melakukan pengelolaan sekolah dengan baik, namun sebagian besar sekolah (umumnya bukan sekolah favorit) tidak tahu bagaimana melakukan pengelolaan sekolah sesuai standar mutu pengelolaan. Kontrol pada seluruh kegiatan di sekolah belum dilakukan dengan baik dan walaupun dilakukan oleh kepala sekolah umumnya mereka tidak memiliki catatan tentang kekurangan yang terjadi, misalnya: (1) apakah guru kelas atau mapel telah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan standar mutu, (2) apakah praktikum yang dijalankan telah sesuai dengan standar mutu yang seharusnya, (3) apakah metode pembelajaran yang dijalankan oleh guru dijamin dapat membuat siswa paham, terampil dan telah membentuk sikap siswa (berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, (4) apakah sarana-prasarana yang dimiliki telah terkelola dengan baik, misalnya apakah kantin cukup sehat, ruang kelas, ruang guru dan fasilitas umum cukup bersih dan nyaman, sarana sanitasi bersih, taman dan ruang terbuka hijau terkelola, sampah sudah terkelola dengan baik, dan (5) bagaimana perilaku siswa, apakah masih terjadi perkelahian antar siswa, *bullying*, tidak disiplin, kurang hormat atau sopan, tidak bisa bekerjasama, tidak menghormati hak orang lain.

Artinya review terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan belum dilakukan oleh sekolah, dengan kata lain sekolah belum memiliki peta mutu pendidikan. Sebagai akibatnya perencanaan tahunan yang dibuat tidak ditujukan

untuk peningkatan mutu, terutama peningkatan mutu pembelajaran dan pengelolaan sekolah untuk dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. Pengawasan oleh pengawas sekolah belum sepenuhnya mampu membaca bagaimana mutu pengelolaan dan proses pembelajaran sekolah. Demikian juga pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, belum secara signifikan bisa meningkatkan mutu sekolah dan dapat ditunjukkan.

Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan

yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SMPE).

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai SPMI. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Maksud dari pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Tujuan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah untuk mengembangkan: (1) percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, (2) pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019. Hasil

yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah: sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri; sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan sekolah berbudaya mutu, serta berdampak pada penumbuhan budi pekerti.

Pengembangan sekolah model SPMI sudah menginjak tahun keempat, namun hasilnya belum mnegembirakan, hal ini dapat dilihat dari peta mutu Pendidikan di SMP Kabupaten Tabanan seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Capaian SNP pada jenjang SMP Kab. Tabanan Tahun 2018

No	STANDAR	NASIONAL	PROV. BALI	KAB. TABANAN
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.27	6.5	6,40
2	Standar Isi	5.83	5.96	5,91
3	Standar Proses	6.47	6.61	6,58
4	Standar Penilaian	6.00	6.27	6,26
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.40	3.72	3,94
6	Standar Sarana Dan Prasarana	3.95	3.93	3,94
7	Standar Pengelolaan	5.79	6.05	5,98
8	Standar Pembiayaan	5.76	5.83	5,89

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php> tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diuraikan bahwa capaian SNP jenjang SMP di Kabupaten Tabanan masih perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan pendidikan. Kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk membenahi kualitas pendidikan. Sebagai gambaran Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan walaupun lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional tetapi baru menuju SNP.III, demikian pula dengan Standar Sarana dan Prasarana masih dalam satu level dengan Provinsi maupun Nasional menuju SNP.III.

Hasil di atas menunjukkan bahwa harapan mewujudkan sekolah memenuhi standar nasional pendidikan melalui pengembangan sekolah model SPMI pada jenjang SMP di Kabupaten Tabanan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Program SPMI telah dilakukan melalui bimbingan teknis dan pendampingan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali secara berkesinambungan dan berkelanjutan, namun hasilnya belum optimal. Untuk itu perlu kiranya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengembangan sekolah SPMI. Evaluasi program dilakukan dalam rangka memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan program tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada sekolah model dalam hal ini adalah SMP Negeri 1 Penebel sebagai berikut.

1. Warga sekolah (guru, pegawai dan komponen lain) belum semuanya memahami tentang regulasi yang berkaitan dengan SPMI, hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan kepala sekolah kepada warga sekolah.
2. Sekolah menerapkan SPMI berdasarkan regulasi yang ada, tanpa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah, sehingga terkesan sangat sulit diterapkan.
3. Guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Penebel sangat minim mengetahui indikator mutu pendidikan.

4. Organisasi terkait SPMI di SMP Negeri 1 Penebel belum bisa bekerja secara maksimal karena komponen-komponen yang ada di dalamnya belum optimal mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing.
5. Rapor mutu pendidikan SMP Negeri 1 Penebel belum refresentatif menggambarkan kondisi riil sekolah, karena pemahaman tentang instrumen penjaminan mutu pendidikan masih kurang.
6. Masyarakat kurang dilibatkan dalam implementasi SPMI pada satuan Pendidikan sehingga kurang mendorong masyarakat melibatkan diri dalam penjaminan mutu pendidikan.
7. Perancangan rencana kerja sekolah belum sepenuhnya berdasarkan kondisi riil sekolah sehingga perencanaan pemenuhan mutu tidak berfungsi maksimal.
8. Siklus penjaminan mutu belum dilakukan secara maksimal.
9. Belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang program SPMI melalui model CIPP.

1.3 Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan luasnya ruang lingkup implementasi SPMI pada satuan pendidikan, maka perlu adanya pembatasan. Penelitian evaluasi ini akan dilakukan menggunakan evaluasi model CIPP (konteks, input, proses dan produk), tidak melihat dampak yang ditimbulkan oleh program sekolah model SPMI, karena program sedang berjalan belum signifikan dapat dilihat dampaknya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan system penjaminan mutu internal (SPMI) di SMP Negeri 1 Penebel seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen konteks (*context*) di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen input (*input*) di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan?
3. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen prose (*process*) di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan?
4. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen produk (*product*) di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan?
5. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen konteks, input, proses, dan produk di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sekolah model SPMI SMP Negeri 1 Penebel dilihat berfungsinya kompoenen konteks, input, proses dan produk. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen konteks (*context*) di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen input (*input*) di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan
3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen proses (*process*) di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan
4. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen produk (*product*) di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan
5. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditinjau dari komponen konteks, input, proses, dan produk di SMP Negeri 1 Penebel Kabupaten Tabanan

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini secara umum adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan khususnya LPMP Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pendidikan maupun SMP Negeri 1 Penebel dalam rangka perumusan kebijakan tentang implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Secara rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoretis

1. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pengkajian dalam pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada satuan pendidikan. Hasil penelitian ini memperkuat apa yang dinyatakan Stufflebeam (1986) yang menyatakan bahwa evaluasi model

CIPP (*context, input, process and product*) dapat digunakan untuk mengambil keputusan suatu program. Dengan demikian, sangatlah tepat bahwa dalam mengevaluasi program SPMI pada satuan pendidikan dengan model CIPP dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap efektivitas program tersebut.

2. Memperoleh konstruksi baru penerapan program SPMI pada satuan pendidikan baik dari aspek teoretis maupun implementatif serta memperoleh praktik baik dalam implementasi SPMI

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi SMP Negeri 1 Penebel

Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan program SPMI dengan model CIPP. Gambaran ini menjadi refleksi untuk terus meningkatkan kualitas implementasi sistem penjaminan mutu internal agar dapat mewujudkan sekolah yang berbudaya mutu.

2. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dalam memfasilitasi peningkatan mutu sekolah melalui program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada satuan pendidikan khususnya SMP Negeri di Kabupaten Tabanan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar mengoptimalkan kinerja tim penjaminan mutu pendidikan daerah (TPMPD) Kabupaten Tabanan.

3. Bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Bali dalam rangka merumuskan kebijakan dan strategi pendampingan SPMI pada satuan pendidikan yang akan datang.

